

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara-bangsa Indonesia di era modern telah mengalami pahit-getirnya gelombang sosial, seperti terjadi di penghujung kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, serta di awal Order Reformasi. Sebagai contoh, Pancasila mempunyai stigma karena sepak terjang rezim otoriter Orde Lama maupun Orde Baru. Orde Lama menggiring Pancasila pada ortodoksi ideologis Manipol-Usdek bahkan konsepsi simplistik Nasakom. Sementara orde baru memerosokkan pada jeram mistifikasi dan ideologisasi monologis Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan asas tunggal. Sehingga Pancasila yang di awal kelahirannya secara eksistensialis ibarat sebuah keajaiban yang maujud, kemudian di era Reformasi hampir dilupakan dan dianggap ideologi kalah, bahkan analog dengan rezim orde baru itu sendiri. Padahal Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu. Ia secara substansialis dirumuskan sebagai *Grundsnorm* bagi konsensus untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda dan hidup di kawasan yang luas; untuk berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia: *the country of thousands impossibilities* (Somantri, 2006).

Secara folosofis hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini mendasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”. Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralis”

Arif Prasetyo Wibowo, 2018

PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI WAHANA MENUMBUHKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN PARTAI POLITIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meliputi susunan kodrat manusia, rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia “monopluralis” tersebut (Kaelan, 2002).

Di bidang politik, Alfian (1986) menjelaskan pembangunan dan pembaruan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan. Pengertian pertama ialah adanya suatu sistem ideal yang ingin dicapai. Kedua ialah penilaian bahwa sistem politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena itu perlu diperbaiki atau diperbarui. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini sistem politik ideal yang di inginkan itu ialah Demokrasi Pancasila. Lebih lanjut Kaelan (2002) menjelaskan pembangunan dan pengembangan harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subyek negara. Oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang menghambat jalanya proses percepatan pembangunan nasional terlebih di bidang politik, diantaranya dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kafid (2016) menjelaskan telah terjadi orientasi gerakan kelompok keagamaan islam beraliran radikal di era desentralisasi demokrasi, dari basis isu islamisme (penegakan syariat islam) ke arah “premanisme” (penguasaan sumber daya ekonomi) yang patut dijadikan perhatian bersama. Dalam hasil survei yang dilalukan oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. (Detik.com) pada tahun 2005 publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%, tahun 2010 menjadi 79,4%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan di tahun 2018 menjadi 75,3%. Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro-Pancasila mengalami penurunan sebanyak 10%. Sedangkan publik yang pro-NKRI bersyariah ialah mengalami kenaikan sebanyak 9% selama 13 tahun.

Lebih lanjut Manan dan Harijanti (2014) menjelaskan, sebagai *das sollen*, usaha-usaha menemukan stelsel dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat Indonesia sangatlah dihargai. Namun, pada tataran *das sein* bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Hal itu disebabkan: pertama, perpaduan-perpaduan konseptual ternyata tidak disertai dengan penjabaran mengenai *rule of the game* yang juga menggambarkan perpaduan tersebut. Selain itu, tingkah laku politik turut memberikan kontribusi yang serius. Akibatnya, para pelaku demokrasi “bebas” menciptakan *rule of the game* menurut paham dan pengetahuan yang memengaruhi diri mereka serta keinginan-keinginan politik yang hendak dicapai. Kedua, demokrasi merupakan suatu mekanisme yang tidak mudah dan kompleks baik secara kelembagaan maupun mekanismenya. Demokrasi memerlukan kesabaran dan pengalaman. Berbagai kegagalan demokrasi di masa lalu antarlain karena kurangnya kesabaran dan pengalaman berdemokrasi termasuk pemecahan persoalan secara demokratis.

Saputro (2015) dalam penelitiannya menjelaskan kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang diwakili oleh tata kelola partai politik masih jauh dari keadaan yang ideal. Pertama, partai politik yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik masih harus terus berproses dalam menjalankan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kedua, Partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama. Pendidikan politik seakan tenggelam di antara hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Irham (2016) menjelaskan eksklusivitas dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sentralisme partai politik yang mengabaikan kontrol anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi demokratis di kalangan kandidat dan elite partai politik.

Mengenai pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik Mariana (2011) pengamat politik Universitas Padjadjaran menjelaskan partai politik sejatinya memiliki tugas lebih dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik telah menerima bantuan keuangan dari

APBN/APBD sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun karena pemahaman mengenai pendidikan politik sangat lentur dan tidak adanya pertanggung-jawaban untuk substansinya maka efektifitas program tersebut belum teruji. Agar anggaran dari APBN/APBD ini efektif digunakan untuk pendidikan politik yang benar, sebaiknya pemerintah membuat pedoman dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan gubernur, atau peraturan walikota/bupati yang standarisasinya bisa dibuat oleh lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

Oleh karena partai politik memiliki peran yang menentukan dalam sebuah keberlangsungan sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam kelembagaan sistem politik. Partai politik harus mampu menerjemahkan nilai dan kepentingan dalam suatu masyarakat dengan proses dari bawah ke atas, sehingga nilai dan kepentingan masyarakat tersebut menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat dalam mempercepat proses terwujudnya cita-cita nasional. Diantara banyak fungsi demokratisasi yang menjadi kewajiban partai politik adalah memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka (Meyer, 2012).

Oleh karena itu pendidikan politik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam kehidupan partai politik sebagai proses demokratisasi di Indonesia. pendidikan politik atau sosialisasi politik merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai ideologi dan konstitusi yang merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh warga negara (Sunatra, 2016).

Atas dasar permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pendidikan Politik Sebagai Wahana Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Partai Politik**; Studi Kasus Terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat”. Meskipun riset mengenai pendidikan politik sudah banyak dilakukan, riset ini menjadi penting karena; *Pertama*, menggunakan Pancasila sebagai pendekatan untuk mengetahui penerapan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai kepada para kadernya. *Kedua*, Pendidikan politik yang di maksud adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada kadernya sebagai proses regenerasi kehidupan partai. *Ketiga*, Melihat bagaimana peran partai politik dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah mengenai bagaimana pendidikan politik melalui kaderisasi partai politik dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada setiap kadernya. Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti membatasi kajian masalah dalam beberapa rumusan masalah, dengan diantaranya sebagai berikut:

1. Apa makna pendidikan politik bagi partai dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada kader?
2. Bagaimana partai politik melakukan proses pendidikan politik dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada kader?
3. Pendekatan, metode dan media apa saja yang digunakan oleh partai politik dalam proses pendidikan politik kepada kader?
4. Hambatan apa yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada para kader?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk menggali, mengkaji dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik sebagai sarana dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kader partai-nya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini memiliki tujuan khusus yang diantaranya sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui apa makna pendidikan politik bagi partai politik dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya.
- b. untuk mengetahui bagaimana pengaruh platform partai politik terhadap nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan politik yang dilakukan kepada para kader.
- c. Untuk mengetahui pendekatan, metode, dan media apa saja yang digunakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam melaksanakan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada kader-nya.
- d. untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada kader partai-nya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan upaya peneliti untuk memperoleh informasi dan data mengenai peran partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik sebagai wahana penanaman nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Segi Teori

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan terutama mengenai konsep Pancasila dan pendidikan politik. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep terbaru dalam kajian bidang pendidikan

Pancasila dan kewarganegaraan. Khususnya mengarah pada pandangan yang multifaset dan meluas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penguatan kesadaran dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1.4.2 Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat mengenai peran partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik sebagai sarana penanaman nilai-nilai Pancasila kepada kader partai maupun masyarakat umum. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam berbagai keputusan yang akan di keluarkan oleh pemerintah dan perguruan tinggi.

1.4.3 Segi Praktik

- a. Bagi partai politik, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan peran nyata fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik kepada kader partai-nya dan masyarakat umum, sehingga diharapkan partai politik dapat mengembangkan model dan pola pendekatan yang lebih baik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan meminimalisir tingkat apatisme politik di kalangan masyarakat.
- b. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai sarana dalam pendidikan politik kepada mahasiswa. Sehingga perguruan tinggi dapat mengembangkan model-model dan pola pendekatan yang dapat di implementasikan dalam menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya wawasan kebangsaan dan *political literacy*.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan perkembangan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan terhadap wawasan kebangsaan baik terhadap kader partai maupun masyarakat umum.
- d. Bagi orangtua, penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan serta memahami isu-isu yang dapat

melahirkan konflik di masyarakat, sehingga penelitian ini dapat mendorong pendidikan di dalam keluarga dalam meningkatkan pemahaman mengenai *political literacy*.

1.4.4 Segi Isu Serta Aksi Sosial

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, organisasi kemahasiswaan (intra maupun ekstra kampus), dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi *community civic education* yang baik guna mempersiapkan warga negara khususnya generasi muda dalam proses regenerasi percepatan pembangunan menuju integrasi nasional.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5804/UN40/HK/2015 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI, struktur organisasi dalam pengerjaan tesis ini diantaranya terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini pada dasarnya menjadi bab pengenalan, dengan menguraikan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian Pustaka/ Landasan Teoritis

Pada prinsipnya kajian pustaka/ landasan teoritis ini berisikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hokum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji;
- b. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek penelitian, dan temuannya;
- c. Posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian

Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil dan pengolahan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab IV Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.